RENCANA KERJA

DINAS PERTANIAN
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERTANIAN
Jl. Anjuk Ladang No. 37 Loceret Nganjuk
E-mail : pertanian@nganjukkab.go.id

PARAF KOORDINASI			
No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pendaku		31/7/24
2.	Kabid PKHK		31/07
3	JF Perencana		31/24
4.			
5.			

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

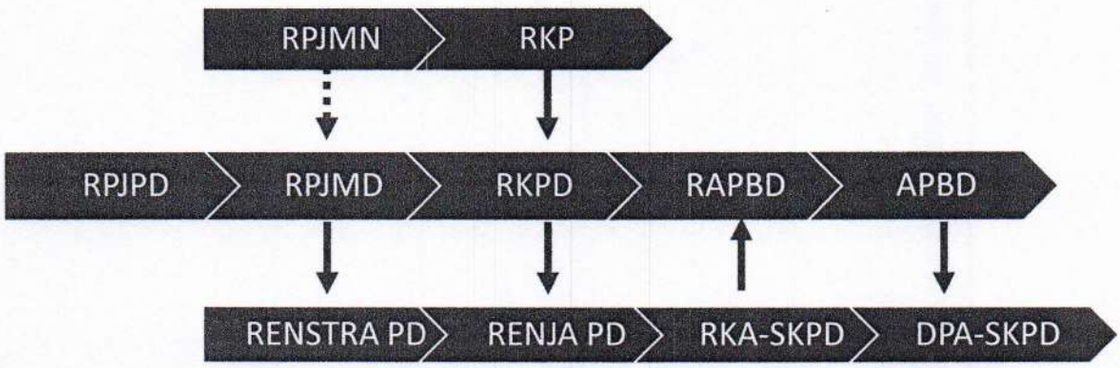
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:
- ⋯▸ diperhatikan
- ▷ dipedomani dan/atau diacu
- ⟶ dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
28. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.

29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluarahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
42. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor1);
45. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
46. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
47. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
48. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

49. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
50. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;
51. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran atau pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2025 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023;
b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 pada tahun ke-2 (dua) periode tahun 2025; dan
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2023, serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

(Target Berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026)

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3				**Urusan Pemerintah Pilihan**									
3	**27**			**Urusan Pemerintah Bidang Pertanian**									
3	**27**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Indek Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah**	**86,70 Nilai**	**78 Nilai**	**86,7 Nilai**	**86,01**	**99,20%**	**81,5 Nilai**	**245,51**	**61,37%**
3	27	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	31 Dokumen	30 Dokumen	31 Dokumen	25 Dokumen	80,65%	47 Dokumen	102 Dokumen	25,5%
3	27	01	2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	15 dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	20 Dokumen	45 Dokumen	11,25%
3	27	01	2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	7 dokumen	8 Laporan	8 Laporan	100%	12 Dokumen	27 Laporan	6,75%

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	27	01	2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	9 Laporan	6 Laporan	1,5%
3	27	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	67 Dokumen	85 dokumen	67 dokumen	67 dokumen	100%	81 dokumen	219 dokumen	54,75%
3	27	01	2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	244 orang	12 Bulan	244 orang	230 orang	94,26%	237 orang	479 orang	119,75%
3	27	01	2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	0	50 Dokumen	50 Dokumen	100%	50 Dokumen	100 Dokumen	25%
3	27	01	2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan laporan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	0,75%
3	27	01	2.02.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	6 dokumen	1,5%

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	27	01	2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	6 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	30 Laporan	7,5%
3	27	01	2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	16 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	20 Laporan	5%
3	27	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi dan koordinasi bagian umum yang dilaksanakan	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	7 Jenis	87,5%	9 dokumen	24 Jenis	6%
3	27	01	2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	0,75%
3	27	01	2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7 Paket	3 Paket	43 Paket	14,3%	3 Paket	53 Paket	13,25%
3	27	01	2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	9 Paket	2,25%

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	27	01	2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	6 Paket	1,50%
3	27	01	2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12 bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	14 Dokumen	3,50%
3	27	01	2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	12 bulan	5 Laporan	5 Laporan	100%	24 Laporan	41 Laporan	10,25%
3	27	01	2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	12 bulan	50 Laporan	70 Laporan	36%	50 Laporan	132 Laporan	33%
3	27	01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik Perangkat Daerah yang diadakan	9 Unit	0	9 Unit	9 unit	100%	9 unit	18 Unit	4,5%
3	27	01	2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Paket	0	9 Paket	9 paket	100%	6 unit	15 Unit	3,75%
3	27	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemeliharaan daerah yang tersedia	2 jenis	12 bulan	2 jenis	2 jenis	100%	3 jenis	17 jenis	4,25%
3	27	01	2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	9%

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	27	01	2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	9%
3	27	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik Perangkat daerah yang dipelihara	61 unit	12 bulan	61 unit	50 unit	81,97%	182 unit	244 unit	61%
3	27	01	2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	0,75%
3	27	01	2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	99 Unit	113 Unit	28,25%
3	27	01	2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	100%	30 Unit	74 Unit	18.50%
3	27	01	2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	31 Unit	13 paket	31 Unit	20 Unit	19,35%	31 Unit	64 Unit	16%

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	**27**	**02**		**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Persentase sarana yang digunakan**	**100%**	**85,28 %**	**100 %**	**87,70 %**	**87,70 %**	**100 %**	**272,98 %**	**68,24%**
3	27	02	2.01	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	umlah kelompok yang diawasi dan didampingi terkait penggunaan sarana pendukung pertanian	1.275 kelompok tani	1.275 kelompok tani	1.275 kelompok tani	1.275 kelompok tani	100%	1.275 kelompok tani	3.825 kelompok tani	956,25%
3	27	02	2.01.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	24 unit	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 laporan	48 Laporan	12%
3	27	02	2.01.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 laporan	36 Laporan	9%
3	27	02	2.02	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Genetik tanaman berkualitas yang tersedia	3 komoditas	3 komoditas	3 komoditas	3 komoditas	100%	3 kegiatan	9 komoditas	2,25%
3	27	02	2.02.1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	3 VUB	3 VUB	3 VUB	3 VUB	100%	3 VUB	9 VUB	2,25%
3	27	02	2.02.3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	3 dokumen	11 dokumen	2,75%

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	27	02	2.05	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akseptor pelayanan Inseminasi Buatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	6 kegiatan	1,5%
3	27	02	2.05.1	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	33.750 Ekor	33.000 ekor	33.750 Ekor	33.172 Ekor	98,29%	34.000 ekor	100.172 Ekor	25043%
3	27	03		**Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian**	**Prosentase prasarana pertanian yang digunakan**	**100%**	**100%**	***100%***	***100%***	**100%**	**100%**	***300%***	**75%**
3	27	03	2.02	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah pembangunan prasarana pertanian	11 Unit	34 unit	11 Unit	17 unit	154,55%	31 unit	82 unit	20,5%
3	27	03	2.02.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	8 Unit	1 unit	8 Unit	8 unit	100%	8 Unit	17 unit	4,25%
3	27	03	2.02.8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	3 unit	7 Unit	7 unit	100%	5 unit	15 unit	3,75%
3	27	03	2.02.9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2 Unit	1 unit	2 Unit	2 Unit	100%	10 unit	13 unit	3,25%

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	**27**	**04**		**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**	**4,07 %**	**85,12 %**	**4,07 %**	**-32,48%**	**-798,03%**	**10%**	**127,57 %**	**31,89%**
3	27	04	2.01	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100%	16 Laporan	48 Laporan	12%
3	27	04	2.01.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	12%
3	27	04	2.01.2	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	2 Laporan	10 Laporan	2,5%
3	27	04	2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Dalam daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	8 Laporan	16 Laporan	4%

17

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	27	04	2.02.1	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	0	8 Laporan	2%
3	27	04	2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	3 laporan	16 Laporan	4%
3	27	04	2.03.2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 laporan	4 Laporan	1%
3	27	04	2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah laporan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 laporan	6 Laporan	1,5%
3	27	04	2.04.3	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 laporan	6 Laporan	1,5%
3	**27**	**05**		**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana**	**100 %**	**99,98%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**299,98%**	**74,99%**
3	27	05	2.01	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan pertanian yang dilakukan pengamanan produksi	1.842 ha	1.584 Ha	1.230 Ha	1.393,23 ha	113,27%	1.750 ha	4727,23 ha	1181,81 %

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	27	05	2.01.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1.200 Ha	20 Ha	1.200 Ha	1.363,23 Ha	113,6%	950 Ha	2333,23 Ha	58331%
3	27	05	2.01.2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	25 Ha	400 Ha	25 Ha	25 ha	100%	500 ha	925 ha	231,25%
3	27	05	2.01.3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	5 Ha	12 bulan	5 Ha	5 Ha	100%	300 ha	317 Ha	79,25%
3	27	05	2.01.4	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	1,5%
3	**27**	**06**		**Program Perizinan Usaha Pertanian**	**Persentase pemberian rekomendasi Izin Usuha Pertanian**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**75%**

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	27	06	2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha peternakan yang terfasilitasi usulan izin usaha	10 rekomendasi	1 rekomendasi	10 rekomendasi	30 rekomendasi	300%	6 dokumen	37 rekomendasi	9,25%
3	27	06	2.01.3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Pelaku Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 laporan	0	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	2 laporan	0,5%
3	**27**	**07**		**Program Penyuluhan Pertanian**	**Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya**	**0,04%**	**100%**	**0,04%**	**0,04%**	**100%**	**0,94%**	**100,98%**	25,24%
3	27	07	2.01	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang meningkat kelas kelompok	40 kelompok tani	30 kelompok tani	40 kelompok tani	40 kelompok tani	100%	24 kelompok tani	94 kelompok tani	23,5%
3	27	07	2.01.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Unit	0	20 Unit	20 Unit	100%	20 unit	40 unit	10%
3	27	07	2.01.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	48 Unit	5 unit	48 Unit	48 Unit	100%	20 unit	73 Unit	18,25%

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk (IKU)

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun								Realisasi Capaian Tahun							Rasio Capaian							Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*
	Renstra Tahun 2018-2023																							
A	**Indikator Tujuan**																							
1	Persentase pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha sektor pertanian	3,45	3,5	3,55	3,60	3,65				3,71	2,35	1,74	5,45	3,19			107,53	67,14	49,01	151,39	87,39			
B	**Indikator sasaran**																							
1	Prosentase Peningkatan Produksi Pertanian (%)	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24				1,09	1,13	0,98%	0,94%	1,18%			87,90	91,13	79,03	75,81	95,16			
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	105,5	106	106,5	107	107,5				108	106,86	103,48	106,83	116,05			102,36	100,81	97,16	99,84	107,95			
3	Persentase Penurunan Kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan (%)	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07				5,02	4,74	6,35%	85,12%	-32,48			123,341	109,82	156,02	-2.091,4	798,03			
	Renstra Tahun 2024-2026																							
A	**Indikator Tujuan**																							
1	Nilai Tukar Petani (NTP)					102	102,5	103	103,5					116,05	-						113,77	-		Nilai NTP belum realise
B	**Indikator sasaran**																							
1	Prosentase peningkatan produksi pertanian					0,174	0,175	0,176	0,177					0,172	0,005						98,85	2,86		Fluktuasi harga komoditas pertanian, anomaly iklim
2	Prosentase peningkatan produksi peternakan					1,7	1,8	1,9	2,0					1,23	1,07						72,35	59,44		Adanya wabah penyakit PMK dan LSD

Sumber: Laporan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Beserta Perubahannya Sampai Tahun 2023

Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							Realisasi Capaian Tahun							Rasio Capaian							Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun																						
	- Padi (kw/ha)	61,46	61,90	62,34	62,77	63,21	63,65	63,97	67,80	67,80	62,34	63,05	64,15	65,96		110,32	109,53	100	100,45	101,49	103,63		dipengaruhi penggunaan sarana dan prasarana pertanian, anomaly iklim, dan Organisme Pengganggu Tanaman
	- Jagung (kw/ha)	67,57	68,60	69,63	70,67	71,73	72,81	73,46	68,60	68,60	69,63	71,20	71,31	71,36		101,52	100,00	100	100,75	98,41	98,01		
	- Kedelai (kw/ha)	20,01	20,21	20,41	20,41	20,62	20,71	20,80	20,31	20,31	20,41	19,45	20,43	20,32		101,50	100,49	100	95,30	98,08	98,12		
2	Persentase penurunan kejadian kasus dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	4	4	4	4	4	10	10	0,92	1,20	0,85	-85,12	-32,48	-92,38		23	30	21,25	2.123	812	923		Adanya wabah penyakit hewan dibandingkan tahun sebelumnya (PMK dan LSD)

Sumber : Laporan LPPD Dinas Pertanian Kab. Nganjuk

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 2.3
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	capaian kinerja 99,20%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Penggunaan aplikasi baru dalam pengukuran SKM dan rensponden yang mengisi aplikasi SKM berkurang dari 100 orang menjadi 70 orang	Terdapat resiko kurang tercapainya target kinerja	Memberi wawasan pentingnya mengisi aplikasi SKM
Program Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja**	**Predikat**
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	capaian kinerja 87,70%	Tinggi

Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Kebutuhan pupuk subsidi lebih banyak di bandingkan dengan realisasi pupuk bersubsidi dari pusat	Terdapat resiko kurang tercapainya target kinerja karena belum tercukupi kebutuhan pupuk bersubsidi	Mengusulkan kembali kekurangan kebutuhan pupuk dan menggalakkan penggunaan pupuk organik
Program Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja**	**Predikat**
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	capaian kinerja 100%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pembangunan prasarana pertanian sesuai dengan usulan/proposal	Capaian kinerja tercapai 100%	Optimalisasi pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian dalam mendukung peningkatan produksi
Program Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja**	**Predikat**
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	capaian kinerja 798,03%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Adanya kejadian kasus penyakit hewan menular LSD dan PMK	Penurunan kejadian kasus penyakit hewan menular semakin tinggi karena banyak basus penyakit hewan yang sudah tertangani	Adanya sosialisasi dan pelayanan penanganan kesehatan hewan serta vaksinansi PMK
Program Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja**	**Predikat**
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	capaian kinerja 100%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Terjadi serangan hama wereng	Terjadi serangan OPT dan bisa dikendalikan	Memfasilitasi gerakan pengendalian OPT oleh kelompok tani melalui pestisida yang tersedia, memfasilitasi penyemprotan menggunakan drone sprayer, menyelenggarakan sekolah lapang pengendalian hama terpadu serta sosialisasi AUTP untuk meminimalisir kerugian

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Perizinan Usaha Pertanian	capaian kinerja 100%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Usulan izin usaha di Aplikasi OSS tidak mempertimbangkan rekomendasi teknis dari OPD terkait	Sudah tercapai target kinerja	Melayani usulan surat rekomendasi teknis dari pelaku usaha
Program Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja**	**Predikat**
Program Penyuluhan Pertanian	capaian kinerja 100%	Sangat tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Belum semua kelompok tani mengikuti SL maupun bimtek karena keterbatasan anggaran	Tercapai target kinerja kelompok tani yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan kemampuan kelompok tani melalui SL dan bimtek

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Triwulan IV

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
A	**Indikator Tujuan**						
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	102	102,5	116,05	-	113,77	-
B	**Indikator sasaran**						
1	Prosentase peningkatan produksi pertanian	0,174	0,175	0,172	0,005	98,85	2,86
2	Prosentase peningkatan produksi peternakan	1,7	1,8	1,23	1,07	72,35	59,44

Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI)

No	Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun - Padi (kw/ha) - Jagung (kw/ha) - Kedelai (kw/ha)	 63,21 71,73 20,62	 63,65 72,81 20,71	 63,05 71,20 19,45	 64,15 71,31 20,43	 101,49 98,41 98,08	 103,63 98,01 98,12
2	Persentase penurunan kejadian kasus dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	4	10	-85,12	-32,48	812	923

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanian Kabupaten Ngajuk mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh Menurunnya daya dukung sumber daya alam akibat anomali iklim dan degradasi lahan, adanya serangan OPT, belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pertanian, Adanya alih

fungsi lahan, fluktuasi harga komoditas pertanian, dan terjadinya wabah penyakit hewan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam peningkatan kinerja pelayanan Perangkat Daerah dilakukan upaya sebagai berikut:

a. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pertanian untuk mendukung pencapaian produktivitas
b. Perlunya peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis yang bersifat zoonosis maupun tidak
c. Perlunya peningkatan pengendalian dan penangganan bencana pertanian
d. Perlunya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapai Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Kurangnya penerapan pupuk berimbang;
b. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
c. Kurangnya penggunaan benih bermutu dan bersertifikat;
d. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur prasarana pertanian;
e. Kurang optimalnya pemanfaatan alat mesin ;
f. Berkembangnya penyakit hewan menular strategis baik yang bersifat zoonosis maupun tidak;
g. Belum optimalnya pelaksanaan gerakan pengendalian OPT;
h. Adanya ancaman bencana pertanian akibat perubahan iklim dan serangan OPT;
i. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan petani.

2.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Program Prioritas Daerah serta Program Nasional/Internasional Yang Mencakup Standar

Pelayanan Minimal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Visi pembangunan jangka panjang Kabupatan Nganjuk yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 adalah **"NGANJUK YANG MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA"**, pelaksanaan jangka menengah Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dengan tujuan pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
2. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
4. Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya.

Dalam pencapaian tujuan pembangunan Daerah dimaksud, (Perangkat Daerah) memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan ke-1, yaitu :

"Nganjuk Tumbuh"

"Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup".

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yangberkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia;

4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang;
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh Perempuan;
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antaranegara;
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya;
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya lautsecara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan;
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Alih fungsi lahan pertanian;
2. Kurangnya penggunaan benih bermutu dan bersertifikat;
3. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur prasarana dan sarana pertanian;
4. Belum optimalnya pelaksanaan gerakan pengendalian OPT melalui PHT;
5. Adanya ancaman bencana pertanian terhadap bencana iklim dan serangan OPT;
6. Kurangnya penerapan pupuk berimbang dan masih tingginya ketergantungan pada pupuk kimia;
7. Kurangnya inovasi dan penerapan teknologi pertanian;
8. Berkembangnya penyakit hewan menular strategis baik yang bersifat zoonosis maupun tidak..

Sedangkan peluang yang didapatkan dalam peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Adanya dukungan yang kuat terhadap Dinas Pertanian;
2. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi tentang pembangunan pertanian berkelanjutan;
3. Peran stake holder mendukung koordinasi lintas sektor yang berjalan dengan optimal;
4. Berkembangnya kegiatan investasi pertanian;
5. Tingginya permintaan hasil-hasil pertanian Kabupaten Nganjuk di pasar lokal, nasional dan global;
6. Terbentuk dan berkembangnya lembaga keuangan mikro di tengah masyarakat/kawasan pengembangan agribisnis;
7. Adanya kerjasama antara pemerintah, swasta dengan petani;
8. Adanya kegiatan dalam rangka mendukung penurunan stunting secara tidak langsung dengan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L);
9. Pembangunan Bendungan Semantok dapat meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah Nganjuk Utara.

2.3.5. Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Isu strategis pelayanan Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pertanian untuk mendukung pencapaian produksi dan produktivitas;
2. Perlu peningkatan pengendalian dan penanganan bencana pertanian;
3. Perlunya peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis yang bersifat zoonosis maupun tidak;
4. Perlunya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah **"Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas".**

Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2025 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2025 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN				**41.625.553.886**	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN**				**41.625.553.886**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		**Nilai SAKIP Dinas Pertanian**	**82 Nilai**	**37.939.777.386**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Nilai SAKIP Dinas Pertanian**	**82 Nilai**	**37.939.777.386**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**41 Dokumen**	**38.305.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**41 Dokumen**	**38.305.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	33.175.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	33.175.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	3.420.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	3.420.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	1.710.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	1.710.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	**81 Dokumen**	**34.803.532.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	**81 Dokumen**	**34.803.532.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Nganjuk	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	237 Orang/ bulan	34.748.097.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Nganjuk	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	237 Orang/ bulan	34.748.097.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	52.135.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	52.135.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.300.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang disusun**	**1 Laporan**	**1.975.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang disusun**	**1 Laporan**	**1.975.000**	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.975.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.975.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**132.085.500**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**132.085.500**	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Nganjuk	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	132.085.500	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Nganjuk	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	132.085.500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk	**Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah**	**7 Dokumen**	**1.122.825.730**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Nganjuk	**Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah**	**7 Dokumen**	**1.122.825.730**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Nganjuk	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.997.685	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Nganjuk	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.997.685	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Nganjuk	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	289.471.195	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Nganjuk	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	289.471.195	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Nganjuk	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	235.531.750	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Nganjuk	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	235.531.750	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Nganjuk	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	51.940.100	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Nganjuk	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	51.940.100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	13.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	13.700.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	14.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	14.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	503.185.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	503.185.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**121 unit**	**100.500.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**121 unit**	**100.500.000**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintah Daerah		**Daerah yang diadakan**			**Pemerintah Daerah**		**Pemerintahan Daerah yang diadakan**			
	Pengadaan Mebel	Kab. Nganjuk	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	117 Unit	100.500.000	Pengadaan Mebel	Kab. Nganjuk	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	53 Unit	100.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah jasa penunjang urusan pemeliharaan daerah yang tersedia**	**3 jenis**	**958.662.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah jasa penunjang urusan pemeliharaan daerah yang tersedia**	**3 jenis**	**958.662.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	205.262.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	205.262.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	752.900.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	752.900.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		**Jumlah barang milik Daerah Penunjang**	**179 Unit**	**781.892.156**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**		**Jumlah barang milik Daerah**	**179 Unit**	**781.892.156**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**			**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Nganjuk	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.987.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Nganjuk	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.987.400	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Nganjuk	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	99 Unit	156.103.050	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Nganjuk	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	99 Unit	156.103.050	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nganjuk	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	67 Unit	74.201.706	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nganjuk	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	67 Unit	74.201.706	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Nganjuk	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	512.600.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Nganjuk	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	512.600.000	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		**Persentase sarana Pertanian yang digunakan**	**100 Persen**	**936.934.350**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		**Persentase sarana Pertanian yang digunakan**	**100 Persen**	**936.934.350**	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		**Jumlah kelompok tani yang diawasi dan didampingi terkait penggunaan sarana pendukung pertanian**	**1.275 kelompok tani**	**137.900.000**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**		**Jumlah kelompok tani yang diawasi dan didampingi terkait penggunaan sarana pendukung pertanian**	**1.275 kelompok tani**	**137.900.000**	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Nganjuk	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	137.900.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Nganjuk	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	137.900.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		**Jumlah kegiatan pengelolaan Sumber Daya Genetik tanaman berkualitas**	**3 kegiatan**	**543.709.250**	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah kegiatan pengelolaan Sumber Daya Genetik tanaman berkualitas**	**3 kegiatan**	**543.709.250**	
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Kab. Nganjuk	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3 VUB	361.493.000	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Kab. Nganjuk	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3 VUB	361.493.000	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Nganjuk	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	3 Dokumen	133.824.250	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Nganjuk	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	3 Dokumen	133.824.250	
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Nganjuk	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	1 Dokumen	48.392.000	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Nganjuk	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	1 Dokumen	48.392.000	
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan		**Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran Benih/Bibit**	**2 kegiatan**	**255.325.100**	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit**		**Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan**	**2 kegiatan**	**255.325.100**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**			**Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**dan peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**			
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Kab. Nganjuk	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	12 Laporan	98.384.300	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Kab. Nganjuk	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	12 Laporan	98.384.300	
	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kab. Nganjuk	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	4 Laporan	156.940.800	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kab. Nganjuk	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	4 Laporan	156.940.800	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		**Persentase prasarana pertanian yang digunakan**	**100 Persen**	**1.014.850.000**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		**Persentase prasarana pertanian yang digunakan**	**100 Persen**	**1.014.850.000**	
	Pembangunan Prasarana Pertanian		**Jumlah pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan**	**6 Unit**	**1.014.850.000**	**Pembangunan Prasarana Pertanian**		**Jumlah pembangunan, Rehabilitasi dan**	**6 Unit**	**1.014.850.000**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			prasarana pertanian					**Pemeliharaan prasarana pertanian**			
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Kedungsoko Kab. Nganjuk, Nganjuk, Werungotok Kab. Nganjuk, Rejoso, Kedungpadang	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	4 Unit	808.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Kedungsoko Kab. Nganjuk, Nganjuk, Werungotok Kab. Nganjuk, Rejoso, Kedungpadang	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	4 Unit	808.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Nganjuk, Rejoso, Gempol Kab. Nganjuk, Rejoso, Ngangkatan	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	206.850.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Nganjuk, Rejoso, Gempol Kab. Nganjuk, Rejoso, Ngangkatan	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	206.850.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		**Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**	**10 Persen**	**411.069.700**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**		**Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**	**10 Persen**	**411.069.700**	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah ternak yang ditangani**	**80.000 Ekor**	**370.169.600**	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah ternak yang ditangani**	**80.000 Ekor**	**370.169.600**	
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4 Laporan	270.899.950	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4 Laporan	270.899.950	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Kab. Nganjuk	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	4 Laporan	99.269.650	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Kab. Nganjuk	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	4 Laporan	99.269.650	
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah laporan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Dalam daerah**	**4 Laporan**	**24.624.000**	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah laporan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Dalam daerah**	**4 Laporan**	**24.624.000**	
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Kab. Nganjuk	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	4 Laporan	24.624.000	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Kab. Nganjuk	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	4 Laporan	24.624.000	
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium		**Jumlah laporan Pelayanan Jasa Laboratorium**	**3 Laporan**	**8.921.500**	**Pengelolaan Pelayanan Jasa**		**Jumlah laporan Pelayanan Jasa**	**1 Laporan**	**8.921.500**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		**dan Jasa Medik Veteriner**			**Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner**			
	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Kab. Nganjuk	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	3 Laporan	8.921.500	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Kab. Nganjuk	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan	8.921.500	
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		**Jumlah laporan pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**2 laporan**	**7.354.600**	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**		**Jumlah laporan pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**2 laporan**	**7.354.600**	
	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Kab. Nganjuk	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	2 Unit Usaha	7.354.600	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Kab. Nganjuk	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	2 Unit Usaha	7.354.600	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANG		**Persentase fasilitasi penanggulangan bencana**	**100 Persen**	**444.303.100**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULAN**		**Persentase fasilitasi penanggulangan bencana**	**100 Persen**	**444.303.100**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	AN BENCANA PERTANIAN					**GAN BENCANA PERTANIAN**					
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		**Luas lahan pertanian yang dilakukan pengawasan produksi**	**1.250 Ha**	**444.303.100**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**		**Luas lahan pertanian yang dilakukan pengawasan produksi**	**1.250 Ha**	**444.303.100**	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Nganjuk	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1.100 Ha	365.380.600	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Nganjuk	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1.100 Ha	365.380.600	
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan,	Kab. Nganjuk	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan,	100 Ha	28.922.500	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman	Kab. Nganjuk	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman	100 Ha	28.922.500	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Hortikultura, dan Perkebunan		Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani			Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani			
	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Nganjuk	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	50 Ha	50.000.000	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Nganjuk	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	50 Ha	50.000.000	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		**Persentase pemberian rekomendasi izin usuha pertanian**	**100 Persen**	**96.097.250**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**		**Persentase pemberian rekomendasi izin usuha pertanian**	**100 Persen**	**96.097.250**	
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah pelaku usaha pertanian yang terfasilitasi izin usaha**	**6 dokumen**	**79.083.000**	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah pelaku usaha pertanian yang terfasilitasi izin usaha**	**6 dokumen**	**79.083.000**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Kab. Nganjuk	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	3 Dokumen	22.401.000	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Kab. Nganjuk	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	3 Dokumen	22.401.000	
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kab. Nganjuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	16.412.000	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kab. Nganjuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	16.412.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Kab. Nganjuk	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	40.270.000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Kab. Nganjuk	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	40.270.000	
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar		**Jumlah Usaha peternakan yang dilakukan pengawasan**	**60 usaha peternakan**	**17.014.250**	**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar**		**Jumlah Usaha peternakan yang dilakukan pengawasan**	**60 usaha peternakan**	**17.014.250**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Hewan, Rumah Potong Hewan					**Hewan, Rumah Potong Hewan**					
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Kab. Nganjuk	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang diawasi	1 laporan	8.514.250	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Kab. Nganjuk	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang diawasi	1 laporan	8.514.250	
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Kab. Nganjuk	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	4 laporan	8.500.000	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Kab. Nganjuk	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	4 laporan	8.500.000	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		**Persentase kelembagaan petani yang meningkat Kapasitasnya**	**1,10%**	**782.522.100**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		**Persentase kelembagaan petani yang meningkat Kapasitasnya**	**1,10%**	**782.522.100**	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		**Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pelatihan**	**25 kelompok tani**	**782.522.100**	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**		**Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pelatihan**	**25 kelompok tani**	**782.522.100**	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di	Kab. Nganjuk	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan	20 Unit	439.502.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di	Kab. Nganjuk	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan	20 Unit	439.502.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kecamatan dan Desa		Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			Kecamatan dan Desa		Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Nganjuk	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Unit	93.455.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Nganjuk	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Unit	93.455.000	
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Nganjuk	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	20 Unit	136.440.100	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Nganjuk	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	20 Unit	136.440.100	
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Kab. Nganjuk	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	154 Orang	113.125.000	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Kab. Nganjuk	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	154 Orang	113.125.000	

Sumber: Hasil Analisis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	100%	
	Kegiatan Pdembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian	6 unit	
	Subkegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1. Kelompok Tani Sari Makmur Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso, 2. Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Gempol Kecamatan Rejoso	Jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	2 unit	
	Subkegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1. Kelompok Tani Gemah Subur Kelurahan Werungotok Kecamatan Nganjuk, 2. Kelompok Tani Sejahtera Kelurahan Werungotok Kecamatan Nganjuk, 3. Kelompok Tani Yoso Mulyo Desa Kedungsuko Kecamatan Sukomoro, 4. Kelompok Tani Tani Subur Desa Kedung Padang Rejoso	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	4 unit	

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2025 mengangkat tema **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sebagai berikut :

1. Memperkokoh idiologi pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sisten ketahanan, keamanan negara, dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariat, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentar produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah **"Meningkatnya kesejahteraan petani"**., adapun sasaran yang akan dicapai adalah **"Meningkatkan produksi pertanian dan peternakan"**, dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2025**
Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	103
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2025**
Meningkatkan produksi pertanian dan peternakan	Prosentase peningkatan produksi pertanian	0,176%
	Prosentase Peningkatan Produksi peternakan	1,9%

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

3.3.1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk

Untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2025, yaitu **"Memantapkan sisten ketahanan, keamanan negara, dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariat, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru"**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi, dengan prioritas pembangunan tahun 2025 sebagai berikut :

1. Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi segenap lapisan masyarakat
3. Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, tata kelola sumber daya air, lingkungan hidup dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman
5. Meningkatkan kualitas pendidikan.
6. Meningkatkan stabilisasi keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kerukunan, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana.
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov).

3.3.2. Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Upaya pencapaian target TPB/*SDG's* menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di Tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/*SDG's* di tingkat Nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-20249 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

DINAS PERTANIAN KAB. NGANJUK
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERTANIAN						**41.625.553.886,00**							**43.859.488.900,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**41.625.553.886,00**							**43.859.488.900,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**41.625.553.886,00**							**43.859.488.900,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Dinas Pertanian***	**82 Nilai**			**82 Nilai**	**37.939.777.386,00**						**82 Nilai**	**36.069.488.900,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	47 Dokumen			41 Dokumen	38.305.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan , Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian	47 Dokumen	66.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen			20 Dokumen	33.175.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian	20 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan			12 Laporan	3.420.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian	12 Laporan	10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan			9 Laporan	1.710.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian	9 Laporan	6.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun*	81 Dokumen			81 Dokumen	34.803.532.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian	81 Dokumen	32.956.488.900,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	KIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PEN[illegible]N						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	237 Orang/bulan			237 Orang/bulan	34.748.097.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian	237 Orang/bulan	32.872.488.900,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen			50 Dokumen	52.135.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian	50 Dokumen	80.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	3.300.000,00	Kab, Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian	1 Laporan	4.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang disusun*	1 Laporan			0 laporan	1.975.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian	1 Laporan	7.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	KIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PEN[illegible]AN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			0 Laporan	1.975.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan , Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian	1 Laporan	7.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	1 Dokumen			0 Dokumen	132.085.500,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan , Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian	1 Dokumen	180.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang			50 Orang	132.085.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian	150 Orang	180.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah*	9 Dokumen			7 Dokumen	1.122.825.730,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian	9 Dokumen	770.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	14.997.685,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian	1 Paket	16.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			14 Paket	289.471.195,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian	3 Paket	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	KIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PEN[illegible]N						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			8 Paket	235.531.750,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian	3 Paket	225.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	51.940.100,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian	2 Paket	47.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			2 Dokumen	13.700.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian	1 Dokumen	22.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan			12 Laporan	14.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian	24 Laporan	60.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan			80 Laporan	503.185.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian	50 Laporan	300.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dladakan*	11 unit			121 unit	100.500.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian	11 unit	125.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit			117 Unit	100.500.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian	6 Unit	125.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah jasa penunjang urusan pemeliharaan daerah yang tersedia*	3 unit			3 jenis	958.662.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian	3 unit	1.001.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian	10 Laporan	1.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	205.262.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian	12 Laporan	330.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	KIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PEN[illegible]N						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	752.900.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian	12 Laporan	670.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara*	183 unit			171 unit	781.892.156,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian	184 unit	963.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	KIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PEN AN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit			1 Unit	38.987.400,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian	1 Unit	40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	99 Unit			94 Unit	156.103.050,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian	99 Unit	195.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit			67 Unit	74.201.706,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian	30 Unit	28.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	33 Unit			9 Unit	512.600.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian	33 Unit	700.000.000,00	DINAS PERTANIAN
2.	3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Persentase Sarana pertanian yang digunakan***	**100 %**			**100 %**	**936.934.350,00**						**100 %**	**1.930.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Jumlah kelompok tani yang di awasi dan didampingi terkait penggunaan sarana pendukung pertanian*	1275 kelompok tani			1490 kelompok tani	137.900.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan Prioritas Kab 1 : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Sektor Potensial Pertanian, Dan Pengembangan Perdagangan Industri Yang Diprioritaskan Berbahan Baku Hasil Pertanian	Kelompok tani	1275 kelompok tani	480.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan			12 Laporan	137.900.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan Prioritas Kab 1 : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Sektor Potensial Pertanian, Dan Pengembangan Perdagangan Industri Yang Diprioritaskan Berbahan Baku Hasil Pertanian	Kelompok tani	12 Laporan	480.000.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan pengelolaan Sumber Daya Genetik tanaman berkualitas*	3 kegiatan			3 kegiatan	543.709.250,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Kelompok tani	3 kegiatan	1.260.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen			3 Dokumen	133.824.250,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Kelompok tani	2 Dokumen	160.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen			1 Dokumen	48.392.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Kelompok tani	3 Dokumen	600.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman														
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3 Varietas Unggul Baru (VUB)			3 Varietas Unggul Baru (VUB)	361.493.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Kelompok tani	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	500.000.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota*	2 kegiatan			2 kegiatan	255.325.100,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Peternak dan ternak	2 kegiatan	190.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan														
			Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	4 Laporan			4 Laporan	156.940.800,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Peternak dan ternak	4 Laporan	30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	...KIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PEN...AN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	34400 Laporan			12 Laporan	96.384.300,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Peternak dan ternak	34400 Laporan	160.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Persentase Prasarana pertanian yang digunakan***	**100 %**			**100 %**	**1.014.850.000,00**						**100 %**	**2.000.000.000,00**	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana pertanian*	31 Unit			1 Unit	1.014.850.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Kelompok tani	31 Unit	2.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	8 Unit			0 Unit	206.850.000,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Gempol Kab. Nganjuk, Rejoso, Ngangkatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Kelompok tani	8 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	5 Unit			1 Unit	808.000.000,00	Kab. Nganjuk, Sukomoro, Kedungsoko	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Kelompok tani	5 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	***Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular***	**10 %**			**10 %**	**411.069.700,00**						**10 %**	**960.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah ternak yang ditangani*	80000 Ekor			80000 Ekor	370.169.600,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Peternak dan ternak	80000 Ekor	410.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular														
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	4 Laporan			4 Laporan	99.269.650,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Peternak dan ternak	4 Laporan	160.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	2 Laporan			4 Laporan	270.899.950,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Peternak dan ternak	2 Laporan	250.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Dalam daerah*	8 Laporan			4 Laporan	24.624.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Peternak dan pelaku usaha peternakan	8 Laporan	70.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	AKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PE AAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	8 laporan			4 laporan	24.624.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Peternak dan pelaku usaha peternakan	8 laporan	70.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner*	3 Laporan			1 Laporan	8.921.500,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	UPTD Laboratorium pertanian dan peternak	3 Laporan	450.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0001	Penyedlaan Pelayanan Jasa Laboratorium														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan			1 Laporan	8.921.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	UPTD Laboratorium pertanian dan peternak	1 Laporan	450.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Jumlah laporan pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner*	2 Laporan			2 laporan	7.354.600,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Peternak dan ternak	2 Laporan	30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	KIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PEN AN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	5 Unit Usaha			2 Unit Usaha	7.354.600,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Peternak dan ternak	5 Unit Usaha	30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	***Persentase pengendalian dan penanganan bencana pertanian***	**100 %**			**100 %**	**444.303.100,00**						**100 %**	**1.245.000.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Luas lahan pertanian yang dilakukan pengawasan produksi*	1950 Ha			1250 Ha	444.303.100,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Kelompok tani	1950 Ha	1.245.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1150 Ha			1100 Ha	365.380.600,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Kelompok tani	1150 Ha	850.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	500 Ha			100 Ha	28.922.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Kelompok tani	500 Ha	250.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	300 Ha			50 Ha	50.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Kelompok tani	300 Ha	145.000.000,00	DINAS PERTANIAN
6.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	***Persentase perijinan usaha pertanian yang direkomendasikan***	**100 %**			**100 %**	**96.097.250,00**						**100 %**	**205.000.000,00**	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah rekomendasi usulan izin usaha yang diterbitkan*	6 Dokumen			6 Dokumen	79.083.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Pelaku usaha pertanian	6 Dokumen	155.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	3 Dokumen			3 Dokumen	22.401.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Pelaku usaha pertanian	3 Dokumen	75.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian														
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	2 Dokumen			2 Dokumen	16.412.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Pelaku usaha pertanian	2 Dokumen	40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	150 Laporan			1 Laporan	40.270.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Pelaku usaha pertanian	1 Laporan	40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	*Jumlah usaha peternakan yang dilakukan pengawasan*	70 usaha peternakan			0 usaha peternakan	17.014.250,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Pelaku usaha peternakan	70 usaha peternakan	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.02.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	1 Laporan			0 Laporan	8.514.250,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Pelaku usaha peternakan	1 Laporan	30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.02.0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan														
			Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	4 Laporan			4 Laporan	8.500.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Pelaku usaha peternakan	4 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERTANIAN
7.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***Persentase kelembagaan petani yang meningkat Kapasitasnya***	**1,10 %**			**1,10 %**	**782.522.100,00**						**1,10 %**	**1.450.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	KIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PEN[illegible]AN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pelatihan*	26 kelompok tani			25 kelompok tani	782.522.100,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Penyuluh pertanian dan kelompok tani	26 kelompok tani	1.450.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Unit			20 Unit	439.502.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Penyuluh pertanian dan kelompok tani	20 Unit	570.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Unit			20 Unit	93.455.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Penyuluh pertanian dan kelompok tani	20 Unit	500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	20 Unit			20 Unit	136.440.100,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Penyuluh pertanian dan kelompok tani	20 Unit	250.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	100 Orang			154 Orang	113.125.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P6 - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan , Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Penyuluh pertanian dan kelompok tani	100 Orang	130.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	JUMLAH							**41.625.553.886,00**							**43.859.488.900,00**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan pilihan.

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi 2025 (Rp.)
1	P6.-Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan -Perikanan, kehutanan, Perkebunan berbasis kerakyatan P1 Kab Pertumbuhan ekonomi inklusif dan investasi berbasis sektor potensial pertanian, serta pengembangan perdagangan dan industri	41.625.553.886

Tabel 4.2
Sasaran Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Alokasi 2025 (Rp)
1.	Meningkatkan produksi pertanian dan peternakan	Prosentase peningkatan produksi pertanian	0,176%	3.002.367.350
		Prosentase Peningkatan Produksi peternakan	1,9%	683.409.050

Tabel 4.3
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
		Uraian (Output)	Target	
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN			**41.625.553.886**
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas Pertanian**	**82 Nilai**	**37.939.777.386**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**47 Dokumen**	**38.305.000**

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
		Uraian (Output)	Target	
1	2	3	4	5
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	33.175.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	3.420.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	1.710.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	**81 Dokumen**	**34.803.532.000**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	237 Orang/ bulan	34.748.097.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	52.135.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.300.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang disusun**	**1 Laporan**	**1.975.000**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.975.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**132.085.500**
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	132.085.500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah**	**7 Dokumen**	**1.122.825.730**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.997.685
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	289.471.195
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	235.531.750

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
		Uraian (Output)	Target	
1	2	3	4	5
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	51.940.100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	13.700.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	14.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	503.185.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan**	**121 unit**	**100.500.000**
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	117 Unit	100.500.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah jasa penunjang urusan pemeliharaan daerah yang tersedia**	**3 jenis**	**958.662.000**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	205.262.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	752.900.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**179 Unit**	**781.892.156**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.987.400
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	99 Unit	156.103.050
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	67 Unit	74.201.706
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	512.600.000

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
		Uraian (Output)	Target	
1	2	3	4	5
2.	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase sarana Pertanian yang digunakan**	**100 Persen**	**936.934.350**
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Jumlah kelompok tani yang diawasi dan didampingi terkait penggunaan sarana pendukung pertanian**	**1.275 kelompok tani**	**137.900.000**
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	137.900.000
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan pengelolaan Sumber Daya Genetik tanaman berkualitas**	**3 kegiatan**	**543.709.250**
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3 VUB	361.493.000
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	3 Dokumen	133.824.250
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	1 Dokumen	48.392.000
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**2 kegiatan**	**255.325.100**
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	12 Laporan	98.384.300
	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	4 Laporan	156.940.800
3.	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase prasarana pertanian yang digunakan**	**100 Persen**	**1.014.850.000**
	Pembangunan Prasarana Pertanian	**Jumlah pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana pertanian**	**31 Unit**	**1.014.850.000**
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	4 Unit	808.000.000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	206.850.000

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
		Uraian (Output)	Target	
1	2	3	4	5
4.	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**	**10 Persen**	**411.069.700**
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah ternak yang ditangani**	**80.000 Ekor**	**370.169.600**
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4 Laporan	270.899.950
	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	4 Laporan	99.269.650
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Dalam daerah**	**4 Laporan**	**24.624.000**
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	4 Laporan	24.624.000
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner**	**1 Laporan**	**8.921.500**
	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan	8.921.500
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Jumlah laporan pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**2 laporan**	**7.354.600**
	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	2 Unit Usaha	7.354.600
5.	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase fasilitasi penanggulangan bencana**	**100 Persen**	**444.303.100**
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**Luas lahan pertanian yang dilakukan pengawasan produksi**	**1.250 Ha**	**444.303.100**

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
		Uraian (Output)	Target	
1	2	3	4	5
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1.100 Ha	365.380.600
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	100 Ha	28.922.500
	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	50 Ha	50.000.000
6.	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase pemberian rekomendasi izin usuha pertanian**	**100 Persen**	**96.097.250**
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah pelaku usaha pertanian yang terfasilitasi izin usaha**	**6 dokumen**	**79.083.000**
	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	3 Dokumen	22.401.000
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	16.412.000
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	40.270.000
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	**Jumlah Usaha peternakan yang dilakukan pengawasan**	**60 usaha peternakan**	**17.014.250**
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang diawasi	1 laporan	8.514.250
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	4 laporan	8.500.000
7.	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase kelembagaan petani yang meningkat Kapasitasnya**	**1,10%**	**782.522.100**
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pelatihan**	**25 kelompok tani**	**782.522.100**

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
		Uraian (Output)	Target	
1	2	3	4	5
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Unit	439.502.000
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Unit	93.455.000
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	20 Unit	136.440.100
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian yang Tersedia dan Ditingkatkan Kapasitasnya	154 Orang	113.125.000

Tabel 4.4
Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah	Rincian	
A	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian					
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Hibah uang	1. Kelp. tani Subur Makmur Ds. Ngangkatan Kec. Rejoso 2. Kelp. Tani Sumber Makmur Ds. Gempol Kec. Rejoso	2 Unit	Pembangunan Jalan Usaha Tani	APBD
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Hibah uang	1. Kelp. Tani Gemah subur Kel. Werungotok Kec. Nganjuk 2. Kelp. Tani Sejahtera Kel. Werungotok Kec. Nganjuk 3. Kelp. Tani Yoso Mulyo Ds. Kedungsoko Kec. Sukomoro 4. Kelp. Tani Tani Subur Ds. Kedungpadang Kec. Rejoso	4 Unit	Pembangunan Irigsi tanah dalam	APBD

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan, apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dimaksud dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Pertanian dengan rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD), sebagai implementasi sasaran strategis rencana pembangunan daerah (RPD) dan Renstra Dinas Pertanian yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. Melaksanakan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
   b. Melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Pertanian ; dan
   c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan
3. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA NGANJUK

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(3) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN
   Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan;
b. BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
   Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;

c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan program dan kegiatan;

d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Memuat kebijakan umum rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan

e. BAB V : PENUTUP

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dokumen Rencana Kerja dari:
a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
i. Dinas Tenaga Kerja;
j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
k. Dinas Lingkungan Hidup;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
s. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
u. Dinas Pertanian;
v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
w. Sekretariat Daerah;
x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
z. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
aa. Badan Pendapatan Daerah;
bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
cc. Inspektorat Daerah;
dd. Kecamatan Bagor;
ee. Kecamatan Baron;
ff. Kecamatan Berbek;
gg. Kecamatan Gondang;
hh. Kecamatan Jatikalen;
ii. Kecamatan Kertosono;
jj. Kecamatan Lengkong;
kk. Kecamatan Loceret;
ll. Kecamatan Nganjuk;
mm. Kecamatan Ngetos;
nn. Kecamatan Ngluyu;

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan
3. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA NGANJUK

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

oo. Kecamatan Ngronggot;
pp. Kecamatan Pace;
qq. Kecamatan Patianrowo;
rr. Kecamatan Prambon;
ss. Kecamatan Rejoso;
tt. Kecamatan Sawahan;
uu. Kecamatan Sukomoro;
vv. Kecamatan Tanjunganom;
ww. Kecamatan Wilangan; dan
xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(3) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN
   Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan;
b. BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
   Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;

c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan program dan kegiatan;

d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Memuat kebijakan umum rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan

e. BAB V : PENUTUP

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dokumen Rencana Kerja dari:
a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
i. Dinas Tenaga Kerja;
j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
k. Dinas Lingkungan Hidup;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
s. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
u. Dinas Pertanian;
v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
w. Sekretariat Daerah;
x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
z. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
aa. Badan Pendapatan Daerah;
bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
cc. Inspektorat Daerah;
dd. Kecamatan Bagor;
ee. Kecamatan Baron;
ff. Kecamatan Berbek;
gg. Kecamatan Gondang;
hh. Kecamatan Jatikalen;
ii. Kecamatan Kertosono;
jj. Kecamatan Lengkong;
kk. Kecamatan Loceret;
ll. Kecamatan Nganjuk;
mm. Kecamatan Ngetos;
nn. Kecamatan Ngluyu;

oo. Kecamatan Ngronggot;
pp. Kecamatan Pace;
qq. Kecamatan Patianrowo;
rr. Kecamatan Prambon;
ss. Kecamatan Rejoso;
tt. Kecamatan Sawahan;
uu. Kecamatan Sukomoro;
vv. Kecamatan Tanjunganom;
ww. Kecamatan Wilangan; dan
xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERTANIAN
Jl. Anjuk Ladang No. 37 Loceret Nganjuk
E-mail : pertanian@nganjukkab.go.id